



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI

Made Dwijadhana¹

Program Studi Magister Arsitektur Universitas Udayana

E-mail: deeajuz@gmail.com

Informasi Naskah:

Diterima:

11 Januari 2025

Direvisi:

16 Januari 2025

Disetujui terbit:

16 Februari 2025

Diterbitkan:

Cetak:

29 Maret 2025

Online

29 Maret 2025

Abstract. Besakih Temple is the largest temple for Hindus in Bali Province. The problem that often occurs is when Hindu community pujawali carry out prayers from districts/cities in Bali, as well as outside Bali. Thousands of Hindus come every day to pray at Besakih Temple using land transportation such as two-wheeled motorized vehicles, four-wheeled vehicles, buses, trucks and so on, resulting in extraordinary traffic congestion in the temple area Besakih.

Parking facilities are inadequate and insufficient for parking motorized vehicles, so many new parking lots have emerged which are not well managed, thus adding to the chaos that occurs in the Besakih Temple area, especially in the Margi Agung area. Based on this, in 2022 one of the Bali Province's priority programs will be the construction of infrastructure for the protection of the Besakih Sacred Area.

The aim of this research is to determine the public's perception of infrastructure development in efforts to protect the Besakih Sacred Area. The research method was carried out qualitatively, by descriptively exploring the data obtained both through direct field observation and through literature data related to the Besakih Sacred Area. The results of the research are in the form of community perceptions which will later be useful as consideration for the Bali Provincial Government in implementing similar programs/activities at other temples under the authority of the Bali Provincial Government.

Keyword: Perception, Infrastructure, Margi Agung Besakih

Abstrak: Pura Besakih merupakan pura terbesar bagi umat Hindu yang berada di Provinsi Bali. Permasalahan yang sering terjadi adalah pada saat pujawali masyarakat umat hindu melaksanakan persembahyangan dari kabupaten/kota di Bali, maupun luar Bali. Ribuan umat Hindu yang datang setiap harinya, untuk melaksanakan persembahyangan ke Pura Besakih dengan menggunakan transportasi darat seperti, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan roda empat, bus, truck dan lain sebagainya, mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang luar biasa di Kawasan Pura Besakih.

Fasilitas parkir yang kurang memadai dan tidak mencukupi untuk parkir kendaraan bermotor, sehingga banyak bermunculan parkir-parkir baru yang tidak terkelola dengan baik sehingga menambah kesemrautan yang terjadi di Kawasan Pura Besakih, terutama pada areal Margi Agung. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022 salah satu program prioritas Provinsi Bali yaitu dilaksanakan Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dalam upaya perlindungan Kawasan Suci Besakih. Metode Penelitian dilakukan dengan kualitatif, dengan mengeksplorasi secara deskriptif data yang diperoleh baik melalui observasi lapangan secara langsung serta melalui data literatur yang berkaitan dengan Kawasan Suci Besakih. Hasil dari penelitian berupa persepsi masyarakat yang nantinya akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan sejenis di pura lainnya yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.

Kata kunci: Persepsi, Infrastruktur, Margi Agung Besakih

PENDAHULUAN

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Muhammad, 2004 dalam Fosumah, 2015). Pura Besakih merupakan pura terbesar bagi umat Hindu yang berada di Provinsi

Bali. Permasalahan yang sering terjadi dari tahun ke tahun adalah pada saat purnama kedasa, dimana masyarakat umat hindu melaksanakan persembahyangan dari kabupaten/kota di Bali, maupun luar Bali. Ribuan umat Hindu yang datang setiap harinya, untuk melaksanakan persembahyangan ke Pura Besakih dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, bus, truck dan lain sebagainya, mengakibatkan kepadatan

lalu lintas yang luar biasa di Kawasan Pura Besakih. Kemacetan pun tidak terhindarkan, hal tersebut juga disebabkan karena upacara di Pura Besakih berbarengan dengan Upacara Dewa Yadnya di Pura Batur. Fasilitas parkir yang kurang memadai dan tidak tersedianya jumlah yang mencukupi untuk parkir kendaraan bermotor, sehingga banyak bermunculan parkir-parkir baru yang tidak terkelola dengan baik sehingga menambah kesemrawutan yang terjadi di Kawasan Pura Besakih.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tahun 2022 salah satu program prioritas Provinsi Bali yaitu Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih. Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan tersebut seperti penataan pada Kawasan Kedundung, Manik Mas, Margi Agung dan Bencingah. Dalam program pembangunan yang dilaksanakan seperti penyediaan Gedung Parkir dan Penataan Margi Agung guna dapat mengatasi permasalahan yang ada sebagai sarana penunjang dari Kawasan Suci Pura Besakih. Infrastruktur transportasi yang kurang baik akan mengakibatkan kondisi ruang yang tidak baik juga, dengan kemacetan yang terjadi polusi asap kendaraan juga akan bertambah banyak sehingga kondisi udara akan semakin tercemar dari gas buang atau karbondioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur dalam upaya perlindungan Kawasan Suci Besakih. Penelitian ini berfokus pada persepsi terhadap objek, terhadap kejadian-kejadian yang dialami masyarakat di sekitar lingkungannya. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan strategis yang sejenis pada pura-pura lain yang ada di Bali, dimana Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan selanjutnya mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat dan memberikan kontribusi secara positif terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini penting dilakukan, untuk keberhasilan program/kegiatan strategis Pemerintah, dan perlu keterlibatan masyarakat di setiap pembangunan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

TINJUAN PUSTAKA

a. Persepsi

Persepsi diartikan sebagai suatu proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan yang diterima melalui inderanya (Rangkuti, 2002). Namun makna proses kognitif juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang terlibat. Pandangan lain mengatakan persepsi adalah suatu proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungannya. Kesadaran adalah hal yang positif. Persepsi memerlukan kontak aktual dengan suatu objek dan juga memerlukan proses kognitif dan afektif. Persepsi membantu individu menggambarkan dan menjelaskan apa yang mereka lakukan (Halim; Setiabudi 2005 dalam Suhendra, 2015). Persepsi

adalah pengalaman yang berkaitan dengan objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya dalam kaitannya dengan sensasi, perhatian, harapan, motivasi dan ingatan (Rakhmat; Setiabudi 2005 dalam Suhendra, 2015).

Proses pemahaman rangsangan atau rangsangan yang diperoleh melalui indra menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis 1) Persepsi visual Persepsi visual yang diperoleh dari indra; 2) Persepsi Auditori Persepsi auditori berasal dari indra pendengaran, khususnya telinga; 3) Persepsi taktil Persepsi taktil berasal dari indra peraba, khususnya kulit; 4) Persepsi Penciuman Persepsi penciuman atau olfactory berasal dari bulbus olfaktorius, khususnya hidung.

Menurut Robbins (2001) dalam Haituah (2022), persepsi positif adalah penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada, sedangkan persepsi negatif adalah persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

b. Infrastruktur

Pengertian infrastruktur menurut Neil S. Grigg yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

Pengertian infrastruktur menurut N. Gregory Mankiw dalam ilmu ekonomi, yaitu sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalan umum, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengertian Infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 1974 dalam Kodoatie, 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Muhammad, 2004; Fosumah, 2015).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama dari fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1988; Muhammad, 2004; Fosumah, 2015).

Sedangkan pengertian lain infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 (Peraturan Presiden, 2015), infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Jenis-jenis Infrastruktur

Jika kita menganggap infrastruktur sebagai aset fisik maupun non-materi dan dapat menunjang kehidupan masyarakat umum dalam aspek ekonomi dan sosial. Infrastruktur dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1. Infrastruktur perangkat keras; 2. Infrastruktur perangkat keras non-fisik; dan 3. Infrastruktur lunak. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 (Perpres 2015), jenis infrastruktur ekonomi dan sosial antara lain:

1) Prasarana transportasi; 2) Infrastruktur jalan; 3) Sumber daya air dan prasarana irigasi; 4) Prasarana air minum; 5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) Infrastruktur sistem pengelolaan sampah lokal; 7) Infrastruktur sistem pengelolaan sampah; 8) Infrastruktur telekomunikasi dan TI; 9) Infrastruktur ketenagalistrikan; 10) Infrastruktur minyak, gas dan energi terbarukan; 11) Infrastruktur hemat energi; 12) Infrastruktur perkotaan; 13) Prasarana lembaga pendidikan; 14) Prasarana sarana olahraga dan seni; 15) Infrastruktur wilayah; 16) Prasarana pariwisata; 17) Infrastruktur medis; 18) Prasarana Lembaga Pemasarakatan; dan 19) Infrastruktur perumahan sosial.

Manfaat Infrastruktur

Infrastruktur terbukti membawa banyak manfaat bagi kita. Diantaranya manfaat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mendapatkan keuntungan di bidang sosial, infrastruktur berfungsi sebagai sarana komunikasi. Tanpa infrastruktur, suatu daerah akan terisolasi dan tidak mampu berkomunikasi atau berintegrasi dengan daerah lain. Pada daerah terisolasi, jaringan akan terputus dari daerah luar. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat di wilayah tersebut akan terganggu. Berikutnya, manfaat infrastruktur di bidang perekonomian adalah sarana untuk melakukan transaksi pembelian yang beragam. Selain itu, infrastruktur juga berfungsi sebagai sarana penghubung produksi dan jasa. Jika infrastruktur berjalan dengan baik, maka seluruh kegiatan perekonomian juga akan berjalan lancar. Sehingga masyarakat dapat hidup nyaman dan perekonomian masyarakat juga meningkat. Terakhir, terdapat keunggulan infrastruktur di sektor kebudayaan, khususnya keunggulan karena menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri. Misalnya saja rumah adat. Dalam hal ini infrastruktur berupa perumahan tradisional dibangun sesuai dengan budaya tempat tersebut.

Dampak Infrastruktur

Dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan tekanan pada

infrastruktur. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat mendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis infrastruktur. Peran infrastruktur disini merupakan motor penggerak dalam sektor perekonomian dan dapat menjadi motor penggerak berkembangnya industri terkait sebagai multiplier. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan lapangan kegiatan baru dan memberikan hasil produksi sebagai masukan untuk konsumsi.

Pembangunan ekonomi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan mempengaruhi investasi. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas hidup akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran di suatu negara.

Infrastruktur juga berperan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang infrastruktur biasanya mempunyai dua jenis dampak. Pertama, berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, hal ini mempunyai dampak keseluruhan dalam meningkatkan ketersediaan layanan dan meningkatkan produktivitas sektor swasta dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap investasi dan pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai penghubung antara sumber daya dengan pabrik, manusia dengan pekerjaan, dan produk dengan pasar (Srivansu & Rao, 2013).

c. Parkir

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara waktu. Kemudian pengertian parkir dipertegas lagi oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998) dalam Permata Widianingrum (2021) , parkir adalah keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang tidak bersifat sementara waktu, sedangkan berhenti adalah keadaan tidak bergerak atau suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Dilihat dari cara penempatannya dan dalam operasional sehari-hari menurut Setijowarno dan Frazila (2001) dalam Permata Widianingrum (2021) fasilitas parkir terdiri dari : (1). Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (on street parking) Menurut Dirjen Perhubungan Darat (1998) Fasilitas parkir badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan pinggir/tepi badan jalan. Kemudian D. Setijowarno & R.B.Frazila (2001) menjelaskan bahwa parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir pada badan jalan. Parkir pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh sudut parkir, lokasi parkir dan panjang jalan yang digunakan untuk parkir. (2). Fasilitas Parkir Di luar Badan Jalan (off street parking) Fasilitas parkir di luar badan jalan menurut Dirjen Perhubungan Darat (1989) dalam Permata Widianingrum (2021), adalah fasilitas parkir kendaraan yang tidak berada pada badan jalan atau langsung menempati pada badan jalan, tetapi berada di luar badan jalan yang dibuat

khusus. Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) dalam Permata Widianingrum (2021), fasilitas parkir bukan di badan jalan adalah fasilitas parkir yang berada pada areal tertentu atau di luar badan jalan. Dalam penempatan fasilitas parkir di luar badan jalan dapat dikelompokkan atas dua bagian, yakni: a) Fasilitas untuk umum yaitu tempat parkir berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan sendiri. b) Fasilitas parkir penunjang yaitu berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama (Dirjen Perhubungan Darat, 1998) dalam Permata Widianingrum (2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif, yang mana merupakan penelitian yang berfokus dalam bentuk narasi atau deskripsi. Jika dilihat dari objek yang diteliti, penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dalam upaya perlindungan Kawasan Suci Besakih. Persepsi masyarakat ini perlu diketahui untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan pengaruh dari pembangunan infrastruktur yang terjadi sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi dan sebagai pertimbangan Pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan sejenis di masa mendatang. Persepsi masyarakat ini akan diperoleh dengan cara wawancara langsung terhadap masyarakat/pemedekek pada lokasi penelitian. Sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat/pemedekek pengguna Margi Agung dan Gedung Parkir yang tangkil ke Pura Besakih di tahun 2023.

Teknik pengambilan informan yang digunakan peneliti adalah purposive sampling yaitu dengan memilih secara langsung informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti, yaitu : 1. Berada pada objek penelitian; 2. Sebagai masyarakat/pemedekek pada objek penelitian; dan 3. Dapat berargumentasi dengan baik. Dimana purposive sampling dilakukan dengan pemilihan informan yang ada dalam posisi terbaik dan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Jenis data dalam penelitian ini yakni Data primer (langsung terhadap objek) dan data sekunder (diperoleh melalui media). Teknik analisa yang dilakukan adalah dengan mengkaitkan data yang diperoleh dengan literatur yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pura Besakih

Pura Besakih merupakan sebuah kompleks pura yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Kompleks Pura Besakih memiliki 1 pura pusat (Pura Penataran Agung Besakih) serta 18 pura pendamping (1 pura Basukian dan 17 pura lainnya).

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025 khususnya kawasan Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya merupakan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional, sedangkan Peraturan Tata Guna Lahan Bali tidak mencantumkan kawasan tersebut termasuk dalam kawasan wisata, sehingga tidak boleh bertentangan dengan PP 50 Tahun 2011. Namun untuk menyelaraskan kedua peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan koordinasi yang lebih baik. Pada saat penyusunan PP 50 Tahun 2011 terkait RIPPRNAS yang menetapkan kawasan Besakih - Gunung Agung dan sekitarnya sebagai KSPN, telah dilakukan koordinasi lintas sektoral, dimana Kementerian Pekerjaan Umum merupakan lembaga yang menyusun peraturan tata ruang nasional. , serta seluruh SKPD terkait di daerah (seluruh provinsi) dan harus tercapai kesepakatan sebelum PP dapat diterbitkan. Sesuai ketentuan Pasal 13 undang-undang tersebut. Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yang menyatakan KSPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang kabupaten/kota. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali disebutkan bahwa kawasan Pura Besakih tidak termasuk dalam kawasan wisata (Made Anom Wiryasa & Darma Warsika, 2018).

Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2022 melaksanakan dua Program Strategis, dimana salah satunya adalah Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih. Lingkup Pekerjaan dari program tersebut antara lain berupa Pembangunan Gedung Parkir dan Penataan Margi Agung.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika meyakini pengembangan kawasan Pura Besakih yang terletak di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, akan membawa manfaat sosial dan menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Dalam kunjungan kerja tersebut, beliau mengatakan: "Saya tidak ada kritik karena ini adalah impian kita bersama dan saya sangat yakin akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Besakih, masyarakat Bali, serta masyarakat Hindu di wilayah tersebut nusantara dan dunia".



Gambar 1. Pura Besakih

Sumber : Dokumentasi, 2023

Dari hasil wawancara terhadap pemedekek dari Kabupaten Buleleng (Informan 1) "Setiap tahun saya kesini bersembahyang, dibandingkan keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya, sekarang lebih nyaman dan penataan yang indah. Sekarang kan sudah disediakan fasilitas parkir yang begitu megah dan bersih yang saya rasakan. Mengajak pada masyarakat semua, supaya Bersama-sama menjaga kebersihan, sebab semuanya itu adalah dari kita, agar tidak mengandalkan dari pemerintah saja atau membebani tukang sapu disini. Kita ikut

membersihkan, melestarikan situasi yang sudah bersih dan nyaman”.

Jika dianalisa dari apa yang disampaikan pemedeck (informan 1) diatas, memberikan persepsi yang positif dari apa yang dialaminya sekarang ini. Hal ini sejalan dengan pengertian Persepsi yang disampaikan Rakhmat; Setiabudi 2005 dalam Suhendra, 2015 bahwa persepsi adalah pengalaman yang berkaitan dengan objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya dalam kaitannya dengan sensasi, perhatian, harapan, motivasi dan ingatan.

Gedung Parkir

Pada prinsipnya penataan kawasan Pura Besakih dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menggunakan mekanisme perancangan dan pembangunan melalui kontrak tahun jamak pada anggaran 2021-2022 dengan biaya APBN sebesar Rp 508,1 Miliar. Penataan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 540 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak oleh pemenang tender, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai kontraktor pelaksana dan PT Ciriayasa Cipta Mandiri sebagai Konsultansi Manajemen Konstruksi.



Gambar 2. Tahap Konstruksi Candi Bentar
Sumber : Dokumentasi, 2022

Pekerjaan di Area Manik Mas adalah pembangunan berupa gedung parkir 4 lantai dengan luas 55.201 m² yang terdiri dari area parkir lantai ground dengan kapasitas 5 bus besar dan 61 bus medium, lantai basement I dengan kapasitas 378 mobil, basement II dengan kapasitas 459 mobil, basement III dengan kapasitas 532 mobil. Sementara pada basement IV untuk area pengelolaan sampah dan limbah, Bale Pesandekan seluas 543,6 m², Pura Melanting berukuran 250 m², kios pedagang (18 kios besar berukuran 4 m x 6 m dan 12 kios kecil berukuran 2,5 m x 3 m), toilet sebanyak 113 bilik, bangunan anjung pandang (view point) dengan luas tapak 64 m², jalan akses masuk dan keluar ke gedung parkir, dan jalan menuju Pura Titi Gonggang beserta utilitasnya.



Gambar 3. Tahap Konstruksi Gedung Parkir
Sumber : Dokumentasi, 2022



Gambar 4. Gedung Parkir Sepeda Motor
Sumber : Dokumentasi, 2023

Dari hasil wawancara mendalam dengan pemedeck yang tangkil pada saat Purnama Kedasa, dari Kabupaten Gianyar (Informan 2) menyampaikan “ Dahulu parkir tidak tertata rapi, sedangkan sekarang baru masuk parkir terkesan mewah seperti parkir di mall. Mobil menjadi lebih aman tidak kepanasan dan kehujanan. Kapasitas parkir juga sudah banyak. Terimakasih pak gubernur, dilanjutkan terus penataannya semoga kedepannya semakin baik. Untuk masyarakat semuanya, penataan ini sudah baik, mari dijaga bersama terutama terkait dengan kebersihan, fasilitas yang dibangun, semoga kedepan dapat terjaga dengan rapi dan lingkungan juga semakin bersih.”

Hal senada juga disampaikan dari hasil wawancara dengan pemedeck lain yang tangkil dari Singaraja (Informan 3), dengan menyampaikan “ Sekarang areal parkir tertata rapi, ditambah lagi saat tiba di parkir bawah (Kedundung) sudah disediakan transportasi gratis menuju parkir manik mas, memudahkan pelayanan ini terus ditingkatkan sehingga kenyamanan umat hindu dalam persembahyangan tetap terjaga. Pembangunan ini sangat kami apresiasi dan pelayanan, dimana baru pertama kali merasakan fasilitas dan pelayanan yang sangat bagus. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan nyaman disini dan akan menjadi suatu kebanggaan Bersama bila Pura Besakih bersih, aman, nyaman dan itu akan membawa dampak terhadap pariwisata Bali disamping kenyamanan dalam melakukan persembahyangan”. Dari hasil wawancara dapat terlihat persepsi yang cenderung positif terhadap Infrastruktur Gedung parkir yang dibangun, hal ini dapat terlihat dari penggambaran secara visual terhadap Gedung parkir. Hal ini sesuai dengan Robbins (2001) dalam Haituah (2022), persepsi positif adalah penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

Margi Agung

Dengan pola linier, maka margi agung akan merupakan pusat orientasi, sehingga jalanjalan yang lebih kecil akan bermuara di margi agung. Margi agung bukan saja sebagai pusat orientasi tetapi juga merupakan daerah sakral, harus dapat memisahkan antara yang bersifat profan dan yang bersifat sakral. Untuk itu akan ditata kembali kawasan margi agung sebagai berikut :

a. Kawasan margi agung hanya akan dimanfaatkan sebagai areal sakral terutama untuk mengadakan

prosesi upacara, sehingga dengan demikian kesucian margi agung akan dapat dipertahankan dan tidak akan menodai kesucian pura secara keseluruhan.

b. Pengalihan fungsi sebagian margi agung akan dimanfaatkan sebagai daerah pejalan kaki baik wisatawan maupun penghuni pemukiman kawasan margi agung.

c. Daerah hunian di sepanjang margi agung ini akan tetap difungsikan sebagai tempat berjalan cinderamata, sehingga akan menambah kenyamanan wisatawan dan menambah pendapatan penghuni kawasan margi agung. Pintu keluar masuk penghuni dari rumah sepanjang margi agung menuju margi agung, akan digunakan pemesian angkul-angkul atau sejenisnya menurut ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperlihatkan kebudayaan yang mendukung Kawasan (Gusti & Oka, n.d.)

Ketua PHDI Bali, menilai, proyek penataan kawasan Pura Besakih bukan merupakan proyek KSPN sesuai dengan PP No.50 Tahun 2011. Disisi lain terkait Bus Listrik KSPN trayek Besakih yang sebelumnya sudah diluncurkan dikatakan tidak terkait dengan proyek penataan kawasan suci yang sekarang ini sedang berlangsung. "Proyek ini kan bukan proyek KSPN. Kalau KSPN Besakih kan sudah di tolak dulu," kata I Gusti Ngurah Sudiana.



Gambar 5. Margi Agung Besakih
Sumber : Dokumentasi, 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan tidak akan menyentuh area bangunan utama Pura Besakih yang digunakan sebagai tempat ibadah "Yang terpenting dari penataan kawasan ini untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung yang beribadah dan berwisata. Karena menurut informasi, saat ada upacara besar kondisinya akan sangat ramai. Untuk itu akan dibuat alur masuk dan keluar yang berbeda sehingga tidak ada penumpukan, termasuk sirkulasi jalan untuk kendaraan akan diatur," kata Menteri PUPR. Hal ini sejalan dengan pengertian infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 (Peraturan Presiden, 2015), infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara mendalam dengan pemedeck asal Bangli (Informan 4) pada saat ditemui di margi agung besakih menyampaikan "Margi agung sudah

tertata dengan baik, tidak seperti dulu lagi banyak kendaraan yang parkir disini dan menyebabkan macet dan polusi asap kendaraan bermotor. Namun masih perlu pohon perindang disepanjang jalan ini sehingga pemedeck tidak kepanasan pada saat tangkil". Dilihat dari hasil wawancara yang disampaikan oleh pemedeck, hal ini merupakan persepsi secara visual yang disampaikan informan, tentang apa yang dilihat yang bersifat positif, namun juga disampaikan kekurangan yang terjadi dalam penataan infrastruktur margi agung yang dirasakan oleh pemedeck yang tangkil. Persepsi disini cenderung positif, dimana masyarakat terlihat setuju dengan adanya penataan margi agung dengan menggambarkan tanggapan yang positif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Halim dan Setiabudi 2005 dalam Suhendra 2015, bahwa persepsi membantu individu menggambarkan dan menjelaskan apa yang mereka lakukan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat (Informan 5) pada saat ditemui di margi agung menyampaikan " Pada pelaksanaan konstruksinya lumayan lama, ya mengganggu kami dalam beraktivitas yang tinggal disini, banyak debu dari material di jalan sampai masuk ke rumah, namun sekarang sudah jauh lebih baik daripada dulu, sudah tertata dengan baik dan rapi, sudah terlihat bagus lah. Untuk berdagang juga sudah disediakan tempat, ya lumayan pada saat pujawali biasanya". Dilihat dari hasil wawancara yang disampaikan masyarakat setempat, persepsi yang disampaikan bersifat positif dan negatif. Hal ini dapat terlihat dari terganggunya aktivitas warga setempat pada tahap pelaksanaan konstruksi penataan infrastruktur margi agung. Namun, disampaikan juga persepsi positif setelah selesai pembangunan dari penggambaran positif secara visual. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan (Srivansu & Rao, 2013), Infrastruktur juga berperan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang infrastruktur biasanya mempunyai dua jenis dampak. Pertama, berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, hal ini mempunyai dampak keseluruhan dalam meningkatkan ketersediaan layanan dan meningkatkan produktivitas sektor swasta dan perekonomian secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dalam upaya perlindungan Kawasan Suci Besakih sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat yang terjadi cenderung positif, hal ini dapat terlihat dari penggambaran persepsi secara visual masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur Gedung Parkir dan Penataan Margi Agung, namun terdapat juga persepsi negatif yang disampaikan masyarakat setempat, hal ini dapat terlihat dari apa yang dirasakan masyarakat setempat pada saat pelaksanaan pekerjaan.

2. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam hal ini pembangunan gedung parkir dan penataan margi agung, memberi persepsi visual yang baik dari masyarakat, dimana dengan adanya gedung parkir memberi kesan mewah dan tertata rapi pada parkir kendaraan di besakih, baik sepeda motor, mobil dan kendaraan lainnya.
 3. Program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali, pada dasarnya mendapat respon yang positif dari masyarakat sepanjang dilakukan untuk peningkatan terhadap pelayanan dan fasilitas umum untuk masyarakat.
 4. Selain memberi persepsi yang baik, pembangunan infrastruktur berupa gedung parkir dan penataan margi agung memberi dampak positif bagi masyarakat, memberi kesan indah dan bersih, sehingga masyarakat/pemedeak yang tangkil menjadi lebih nyaman dalam melaksanakan persembahyangan ke Pura Besakih.
- Permata Widianingrum.dkk, (2021) Infrastruktur Jalan Sebagai Lahan Parkir Semarang Bridge Fountain Sungai Banjir Kanal Barat (BKB). Jurnal RUAS Volume 19 No. 2 Desember 2021 ISSN 1693-3702 E-ISSN 2477-6033. Tahun 2021
- Odir, Haituah (2022), Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Ruas Anjungan Ke Batas Serawak. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.2, Oktober 2022. Tahun 2022
- Fathori (2023), Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan. E-ISSN: 3024-8175 Vol.1, No. 1, Juli 2023. Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak yang memberikan dukungan dalam terlaksananya penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Oka, I Gusti Bagus. (2004). Konsep Penataan Kawasan Suci Margi Agung Pura Besakih. Jurnal Permukiman Natah Vol. 2 No. 2 Agustus 2004 : 56 - 107
- Posumah, Ferdy.(2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 02 Tahun 2015
- Suhendra,Ade P.G.dkk,(2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Peningkatan Infrastruktur Jalan Nasional Kabupaten Minahasa Utara. Ejournal.ac.id 2015
- Peraturan Presiden No. 38, (2015), Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Ardiansyah, A., dkk (2017). Studi Karakteristik Parkir Off Street Di Lahan Parkir Stasiun Kereta Api Purwosari Surakarta. Matriks Teknik Sipil, 215.Tahun 2017
- Wiryasa,N.M.Anom, (2018) Analisis Kelembagaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kspn) Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Bali. Jurnal Spektran Vol. 6, No. 1, Januari 2018, Hal. 105 – 110. e-ISSN: 2302-2590. Tahun 2018
- Handayasari, I., Artiani, G.P. (2018). Evaluasi Kapasitas Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Stasiun Commuter Line Tangerang. Jurnal Kajian Teknik Sipil, 3(2), 67-74. Tahun 2018
- Hermanto.dkk,(2019) Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kota Makassar. Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol. VII. Issu 1. Januari-Juni 2019 E_ISSN: 2339-2401/P_ISSN: 2477-0221. Tahun 2019
- Pratiwi, Ririk Darti (2019), Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Infrastruktur Hijau Kota Yogyakarta. Jurnal Lanskap Indonesia | Vol 11 No 1 2019. Tahun 2019